

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia.
- Anwar Borahima. 2023. *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Depok: Rajawali Pers.
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Deassy J.A. Hehasnussa, et al., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Endang Sutrisno. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Farkhani. et. al, 2018. *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing.
- Hayati Soeroredjo. 2005. *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Iman Jalaludin Rifa'i. et.al. 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Irma Fatmawati. 2020. *Hukum Yayasan Pendidikan Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni.

Paul Shorey, 1969, *Plato The Republic*, London: Cambridge, Massachusetts Harvard University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

\_\_\_\_\_.2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Rochmat Soemitro, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Alumni.

Rudhi Prasetya, 2012, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sinto Adi Prasetyorini. 2024. *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Semarang: Lawwana.

Suyud Margono. 2015, *Badan Hukum Yayasan: Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

## **ARTIKEL JURNAL:**

- Abriana Kusuma Dewi. 2022. Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif), *Jurnal Hukum Novum Argumentum*. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Jakarta. hlm. 23-31.
- Andi Adha Arsyad, Arifin Utha, La Ode Mustafa, 2020, Analisis Penerapan Meritokrasi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Struktural Di Kabupaten Kolaka, *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo, Kendari, hlm. 214-222.
- A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati. 2015. Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Narotama. Surabaya. hlm. 1-17.
- Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia. 2021. *Lex Jurnalica*. Volume 18 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. Padang. hlm. 20-26.
- Eldo Fransixco Dumanauw. 2019. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Jurnal Hukum Lex Et Societatis*. Volume 7 Nomor 9. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. hlm. 23-29.
- Gamal Abdul Nasir, 2017, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, hlm. 172 - 183.
- Ismi Nurhayati. et.al. 2023. Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato. *Jurnal Pendidikan Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Volume 1 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung. hlm. 1-17.
- I Gusti Agung Alit Suryawati dan I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa. 2020. Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak. *Jurnal Nomosleca*. Volume 6 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana. Denpasar. hlm. 47-52.
- Juvino Pinori. 2018. Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*. Volume VI Nomor 10. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. hlm. 105-112.
- Muhamad Khamal Akbar Rahmadan. 2023. "Legalitas Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing Di Indonesia". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan*

Humaniora (JURRISH). Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 2. Nomor.2 . hlm. 30-44.

Soni Gunawan Somali. 2018. "Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan". Jurnal Sosiohumanitas. Volume XX Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Bandung. hlm 32-46.

### **TESIS:**

Dina Septiarrestu. 2010. "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan". TESIS. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

### **LEMBAGA/ BADAN:**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.

### **MAJALAH DAN SURAT KABAR/ HARIAN:**

"Wibisono, 2019, "Ditjen AHU dengan Tim Perizinan Ormas Asing Bahas mekanisme Pendaftaran Yayasan Asing", portal.ahu.go.id, Edisi Tanggal 6 September 2019.

Xander Budi, 2024, Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan: Santai atau Cemas, tambahpinter.com, Edisi Tanggal 8 Maret 2024.

### **MEDIA:**

Binus University Faculty of Humanities, Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 April 2025.

<https://careindonesia.or.id/id/20-tahun-pascabencana-tsunami-di-aceh-bantuan-program-beudoh-care-indonesia-masih-tegap-berdiri/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

<https://cirebon.inews.id/read/514457/orang-asing-pemegang-itap-dan-itas-bisa-melintasi-autogate-imigrasi>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_Tanda\\_Penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk).

[https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/?srsltid=AfmBOop5UYJ7VKAERxnnbaL-iZh34DM6\\_Yri3fgZ7L59bGxl\\_Ovb#](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/?srsltid=AfmBOop5UYJ7VKAERxnnbaL-iZh34DM6_Yri3fgZ7L59bGxl_Ovb#) UOa-

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200420193407-106-495412/yayasan-taiwan-sumbang-ventilator-untuk-penanganan-corona-ri>, diakses pada tanggal 20 April 2025.

<https://www.imigrasi.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025.

<https://katadata.co.id/infografik/60f0da5a85f9c/bantuan-asing-saat-badai-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://www.kompas.com/global/read/2020/06/18/144010470/yayasan-temasek-singapura-kembali-salurkan-bantuan-ke-indonesia-perangi>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--komitmen-pelaksana-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025.

<https://paradoksal.info/index.php/pr/article/view/49>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025.

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025.

<https://pontren.com/2021/01/23/pentingnya-taat-kepada-aturan/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025.

<https://portal.ahu.go.id/detail/75-berita-lainnya/2598-ditjen-ahu-kawal-ketat-yayasan-yang-didirikan-pihak-asing>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025.

<https://www.pta-pekanbaru.go.id/21436/asas-asas-pemberlakuan-hukum-dan-waktu-berlakunya-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://text-id.123dok.com/document/6qmw6vj9z-kerangka-pemikiran-menurut-sugiyono-2012-66-hipotesis-hipotesis-menurut-mudrajad-kuncoro-2003-47-48-yaitu.html> diakses tanggal 10 Juni 2025.

<https://ugm.ac.id/id/berita/3423-atasi-ketidajelasan-dan-ketidakleng-kapan-uu-dengan-asas-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200420193407-106-495412/yayasan-taiwan-sumbang-ventilator-untuk-penanganan-corona-ri>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025.

<https://www.youtube.com/live/14MvWPYGzxc?si=bfYKPAdbaN7Dq6uX>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025.